

**KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA RUMAH TANGGA MISKIN
(STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS)**

Oleh :

Suharno¹⁾ dan Endang Setiasih²⁾

¹⁾ Staf pengajar tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Staf pengajar tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The objective of the research are to describe; the mechanism of Direct Cash Helping (Bantuan Langsung Tunai/BLT) program in Sumbang district be a tool to solve the society poorness, the BLT program realization, the factors of supported and resisted of BLT program, to find out better solution which is through of BLT program in Sumbang district, and to analyze whether the BLT program can be overcome the society poorness in Sumbang district.

Population of the research are 9,934 impecunious domestic in Sumbang district, so the number of minimum samples which must be taken at mistake storey level 0,1 % is equal to 100 respondents. Sample collection is done randomly in 19 countryside of Sumbang district.

This Research is direct with the mixing method approach which use between qualitative and quantitative research. To analyze whether there is consideration difference to use of the BLT program, before and after direct aid execution, is used Cochran'S statistisk non-parametrik analysis with the SPSS program at the significant storey at 90% ($\alpha = 10\%$) level. From the result analyses, there is no difference between respondents who had received the aid, before and after execution of acceptance BLT, that is for the accomplishment of daily meal requirement and their debt payment.

Keywords : BLT program, poorness

PENDAHULUAN

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan telah menjadi prioritas utama program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, beberapa proyek pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan terutama pada jenjang *grass-root*, ternyata belum cukup mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik akhir-akhir ini menjadikan permasalahan kemiskinan bukan merupakan persoalan yang cukup sederhana, bahkan fenomena ini telah menjadi kajian dan analisis yang *urgent* dan valid.

Sejak tahun 2000, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) terus berkembang dan alokasi dananya pun terus bertambah. PKPS BBM tahun 2005 meliputi empat bidang yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Perdesaan dan Bidang Subsidi Langsung Tunai dialokasikan dana sebesar Rp. 4,65 triliun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp.100.000/Rumah Tangga/bulan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin.

Di Kabupaten Banyumas, realisasi distribusi dana kompensasi subsidi BBM adalah sebesar Rp.48.745.800.000,- dengan jumlah transaksi

sebanyak 162.486 untuk seluruh kecamatan. Kabupaten Banyumas sebagai penerima dana kompensasi subsidi BBM terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin tahap I sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2005 dan tahap II pada tanggal 1 Januari 2006 serentak di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan hal tersebut adalah;

1. Bagaimanakah mekanisme program pemberian bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sumbang dalam mengatasi kemiskinan?
2. Bagaimanakah realisasi pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Sumbang?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penunjang dan penghambat keberhasilan program pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Sumbang ?
4. Solusi apakah yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam program pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Sumbang?
5. Apakah program pemberian bantuan langsung tunai dapat mengatasi kemiskinan dan mampu memberdayakan rumah tangga miskin ?

METODE ANALISIS

1. Konsep dan Definisi Operasional

Subsidi Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM. Untuk program tersebut pemerintah memberikan dana BLT sebesar Rp100 ribu/keluarga/bulan. Dana tersebut telah mulai dibagikan sejak awal Oktober 2005 untuk 3 bulan sekaligus, yaitu Oktober, November dan Desember 2005. Untuk pemberian BLT tahap kedua untuk bulan Januari, Pebruari, Maret 2006, pencairannya dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2006.

2. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi dalam masyarakat ini adalah Masyarakat Kabupaten Banyumas di Kecamatan Sumbang yang menerima Program Bantuan Langsung Tunai, sedangkan sampel dalam penelitian ini dengan mempergunakan teknik pengambilan simple random sampling dan purposive sampling. Teknik ini menggunakan metode Solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel

Jumlah populasi yang diteliti di Kecamatan Sumbang adalah sebanyak 9.934 rumah tangga miskin, sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil pada tingkat kesalahan 0,1 % adalah sebesar 100 responden (pembulatan). Pengambilan sampel dilakukan secara acak di 19 desa pada Kecamatan Sumbang.

Masing-masing desa diambil sampel sejumlah 5 responden, hanya saja beberapa desa ada yang diambil sejumlah 7 responden. Sementara itu, teknik purposive sampling banyak bermanfaat dan digunakan sebagai bentuk kelengkapan dalam data-data kualitatif. Peneliti di sini mewawancarai pengurus-pengurus Program Bantuan Langsung Tunai di kelurahan-kelurahan tertentu, terutama kelurahan yang memiliki sifat unik dalam realisasi Program Bantuan Langsung Tunai.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixing method, yaitu jenis penelitian yang mempergunakan perpaduan metode antara kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pertimbangan untuk menggunakan bantuan BLT sebelum dan setelah pelaksanaan bantuan langsung tunai digunakan analisis Cochran's statistik non-parametrik menggunakan program SPSS dengan tingkat signifikansi 90%

($\alpha=10\%$). Cochran's digunakan karena penelitian bertujuan menguji apakah terdapat perbedaan pertimbangan penggunaan dana antara sebelum dan setelah pelaksanaan bantuan langsung tunai yang termasuk dalam kategori berpasangan. Formula dari Cochran's (Simamora, 2001) tersebut adalah sebagai berikut:

Ho = Tidak terdapat perbedaan pertimbangan responden terhadap penggunaan bantuan sebelum dan sesudah pelaksanaan penerimaan BLT .

Ha = Terdapat perbedaan pertimbangan responden terhadap penggunaan bantuan sebelum dan sesudah pelaksanaan penerimaan BLT.

$$Q = \frac{(k-1) \left[k \sum_j C_j^2 - \left(\sum_j c_j \right)^2 \right]}{k \sum_i R_i - \sum_i R_i^2}$$

Keterangan :

Q = nilai Cochran's Q test

K = banyaknya atribut yang diuji

Ri = jumlah yang sukses (menjawab Ya) pada atribut ke-l

Dengan $\alpha = 0,05$, derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka :

Ho ditolak, jika Q hitung > Q tabel, atau sig ≤ alpha

Ho diterima, jika Q hitung ≤ Q tabel, atau sig > alpha

HASIL ANALISIS

1. Mekanisme Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Mekanisme program pemberian Bantuan Langsung Tunai adalah :

- Pendataan keluarga miskin oleh BPS.
- Pengiriman data ke PT. Pos
- Pencetakan kartu pengenal oleh PT. Pos
- Pengembalian kartu ke BPS
- Pendistribusian kartu oleh BPS
- Persiapan anggaran (Depkeu, DPR, Bappenas, Kantor Wapres)
- Penyaluran bantuan (PT. BRI dan PT. Pos)
- Monitoring evaluasi
- Penyempurnaan rancangan program

2. Realisasi Pelaksanaan Program BLT

Berhubungan dengan ada tidaknya pendataan yang salah/penyaluran kurang tepat sasaran sebanyak 80 responden menjawab ya, 9 responden menjawab tidak, dan 11 responden menjawab tidak tahu.

- Terkait dengan ada tidaknya pemotongan dana oleh aparat RT/RW/Kelurahan, 100

- responden menjawab tidak terdapat pemotongan oleh aparat RT/RW/Kelurahan.
- b. Terjadi jadwal penerimaan BLT yang terlambat yaitu sebanyak 100 responden menjawab ya.
 - c. Terjadi antrian yang panjang pada saat pengambilan uang yaitu : 99 responden menjawab ya, 1 tidak.
 - d. Tidak terjadi adanya pemungutan berupa "uang pelicin" untuk memperoleh BLT kepada petugas pendata terbukti 100 responden menjawab tidak.
 - e. Berhubungan dengan penerima BLT yang berlaku tidak tertib pada saat penerimaan BLT sebanyak 21 responden menjawab ya, 78 responden menjawab tidak, dan 1 responden menjawab tidak tahu.
 - f. Mengenai ada tidaknya kartu BLT yang ganda, alamat penerima yang fiktif, dan jual beli kartu kompensasi BBM ditemukan jawaban yaitu : 100 responden menjawab tidak.
 - g. Praktek percaloan pada saat mencairkan dana BLT ditemukan jawaban bahwa sebanyak 98 responden menjawab tidak, dan 2 responden menjawab tidak tahu.
 - h. Sosialisasi pemerintah yang masih minim tentang BLT kepada masyarakat, sebanyak 63 responden menjawab ya, 20 responden menjawab tidak, dan 17 responden menjawab tidak tahu.
 - i. Proses penanganan pengaduan oleh pemerintah dinilai oleh penerima BLT kurang baik terbukti sebanyak 80 responden menjawab ya, 3 responden menjawab tidak, dan 17 responden menjawab tidak tahu.
 - j. Ditemukan adanya teror terhadap petugas pendata BLT pada saat melakukan pendataan calon penerima BLT, terbukti sebanyak 68 responden menjawab ya, 31 responden menjawab tidak, 1 responden menjawab tidak tahu.
 - k. Mengenai koordinasi pemerintah yang minim dalam melaksanakan BLT, sebanyak 76 responden menjawab ya, 7 responden menjawab tidak, dan 17 responden menjawab tidak tahu.

3. Faktor-Faktor Penunjang Dan Penghambat Program

Faktor-Faktor Penunjang Program Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin diberikan kemudahan untuk mendapatkan & menikmati BLT.
- b. Masyarakat penerima BLT tidak memiliki beban untuk mengembalikan bantuan kepada pemerintah.
- c. Dukungan pemerintah daerah dan pusat guna keberhasilan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

Faktor-faktor penghambat program Bantuan Langsung Tunai adalah :

- a. Persoalan pada fasilitator kelurahan, petugas, dan pemerintah
- b. Kegagalan perencanaan program

Bantuan langsung tunai dinilai oleh masyarakat hanya sebagai pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja. Oleh karena itu orientasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai harus diubah dari paradigma konsumtif menjadi kegiatan yang bermakna produktif dan membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat.

- c. Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program

Persoalan ini tidak terlepas dari kultur "menerima sumbangan" yang telah terbentuk di masyarakat. Kultur semacam ini bisa terjadi disebabkan oleh dua hal, yakni : Pertama, akibat program-program yang hampir sama dengan sebelumnya. Misalnya, jika JPS, KUKESRA, TAKESRA, yang telah digulirkan sebelumnya dianggap sebagai tanpa prosedur dan tanpa birokrasi yang rumit. Kedua, masyarakat awam terbawa euforia untuk bisa mendapatkan bantuan. Fenomena pada masyarakat banyak ditemukan orang miskin baru, yaitu warga yang secara ekonomi memiliki kecukupan materi tetapi ikut tertarik untuk bisa mendapatkan bantuan BLT.

Tabel 10.1. Pemahaman Responden tentang Penyebab-Penyebab Kelemahan BLT

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Konsep/Prosedur BLT	0	0 %
2.	Fasilitator petugas kelurahan dan pemerintah	77	77 %
3.	Masyarakat penerima BLT	3	3 %
4.	Tidak tahu	20	20 %
		100	100 %

Sumber : Questioner, pertanyaan ke-15

- d. Lemahnya kerjasama antara BPS dengan pamong di tingkat kelurahan

Kurangnya koordinasi antara BPS dengan pamong di tingkat kelurahan menyebabkan proses pendataan yang salah. Pendataan masyarakat miskin yang salah akan berakibat fatal karena sangat menentukan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Sebelum melakukan pencacahan, BPS melakukan penjaringan rumah tangga miskin awal dengan menggunakan informasi dari BKKBN. Data yang dimiliki oleh BPS dan BKKBN ternyata berbeda, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penentuan keluarga miskin. Pada kenyataannya pula pendataan yang dilakukan oleh BPS kurang melibatkan pamong yang ada di tingkat kelurahan. Pendataan keluarga miskin hanya melibatkan tenaga survey yang direkrut oleh BPS.

- e. Kontinuitas sumber dana pemerintah untuk membiayai Bantuan Langsung Tunai

Dalam jangka panjang pembiayaan BLT akan berdampak pada pembebanan anggaran pemerintah untuk terus menerus memberikan bantuan langsung secara tunai dan kecenderungan rakyat untuk malas dan ingin selalu mendapat bantuan dana atau selalu ingin dikategorikan sebagai rakyat

miskin. Oleh karena itu, perlu suatu upaya mencari model terbaik yang tidak hanya dapat mengurangi ketidaktepatan bantuan terhadap rakyat yang memerlukan tetapi juga tidak terus menerus membebani anggaran pemerintah dan menghilangkan kecenderungan rakyat memiliki sikap moral yang buruk. Pada sisi lain, hal ini mesti mempertimbangkan perbedaan kemakmuran antar negara dan antar daerah sekaligus kekayaan alamnya sehingga akan lahir model yang lebih adil dan bisa diterima semua masyarakat.

4. Pemecahan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Di Lapangan

- a. Pemerintah daerah dilibatkan dalam teknis pelaksanaan mengakomodasi data-data kependudukan.
- b. Pemerintah daerah dilibatkan secara intensif dalam setiap pelaksanaan program
- c. Orientasi penyaluran dana harus diubah dari paradigma konsumtif menjadi kegiatan yang bermakna produktif dan membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat

Tabel-tabel berikut ini menjelaskan secara ringkas hasil pengolahan data di lapangan.

Tabel 10.2. Kemampuan BLT Mengentaskan Kemiskinan

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Bisa	22	22 %
2.	Tidak	73	73 %
3.	Tidak Tahu	5	5 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-1

Tabel 10.3. Pemahaman Responden atas Prosedur BLT

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Mudah dipahami	80	80 %
2.	Sulit dipahami	7	7 %
3.	Biasa-biasa saja	13	13 %
		100	100 %

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-2

Tabel 10.4. Pemahaman Responden tentang Perbedaan BLT dengan Program Pengentasan Kemiskinan Sebelumnya

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Sama saja	0	0 %
2.	Tidak sama, lebih bagus	69	69 %
3.	Tidak sama, lebih jelek	31	31 %
4.	Tidak tahu	0	0 %
		100	100 %

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-17

Tabel 10.5. BLT dan Pemenuhan Kebutuhan Makan Sehari-hari

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Bisa	97	97 %
2.	Tidak	3	3 %
3.	Tidak Tahu	0	0 %
		100	100%

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-7

Tabel 10.6. Analisis Uji Cochran

	Periode Penerimaan	
	Sebelum	Sesudah
Faktor Pertimbangan Penggunaan BLT	1. Kebutuhan makan sehari-hari 2. Kebutuhan melunasi hutang	1. Kebutuhan makan sehari-hari 2. Kebutuhan melunasi hutang
Nilai Asymp.Sig	0,564	0,157

Tabel 10.7. BLT dan Pemenuhan Penghasilan Tetap/Pekerjaan

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Bisa	51	51 %
2.	Tidak	45	45 %
3.	Tidak Tahu	0	0 %
		100	100%

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-10

Tabel 10.8. BLT dan Pemenuhan Kebutuhan Sandang

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Bisa	3	3 %
2.	Tidak	97	97 %
3.	Tidak Tahu	0	0 %
		100	100%

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-8

Tabel 10.9. BLT dan Pemenuhan Menyekolahkan Anak-Anak

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Bisa	28	28 %
2.	Tidak	72	72 %
3.	Tidak Tahu	0	0 %
		100	100%

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-9

Tabel 10. 10. BLT dan Pemenuhan Kebutuhan Menabung tiap Bulan

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Bisa	1	1 %
2.	Tidak	98	98 %
3.	Tidak Tahu	1	1 %
		100	100%

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-11

Tabel 10.11. BLT dan Hutang pada Pihak-Pihak Lain

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Masih hutang	94	94 %
2.	Tidak hutang	6	6 %
3.	Tidak tahu	0	0 %
		100	100 %

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-12

Tabel 10.12. Pendapat Responden jika Program BLT Dihentikan

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Setuju	6	6 %
2.	Tidak Setuju	72	72 %
3.	Tidak Tahu	22	22 %
		100	100 %

Sumber : Quesioner, pertanyaan ke-16

KESIMPULAN

Program BLT dipandang oleh masyarakat sebagai program yang berbeda dengan program pengentasan kemiskinan sebelumnya. Perbedaan ini didasarkan dari prosedur yang digunakan maupun kelembagaan yang menjadi infrastruktur program ini. Dalam implementasi program, banyak persoalan yang muncul dimana hal ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pemahaman masyarakat tentang visi dan misi BLT. Akibatnya, BLT belum menjadi bantuan yang mendorong kearah pemberdayaan masyarakat, melainkan masih terbatas sebagai bantuan yang meringankan beban masyarakat miskin akibat kenaikan harga-harga secara umum karena pengurangan subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah yaitu untuk

pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari dan pemenuhan pelunasan hutang.

Sekalipun demikian, tidak semua masyarakat sasaran program mengalami persoalan akibat BLT. Di samping mereka mulai belajar kebijakan pemerintah, transparansi program dan partisipasi, mereka juga mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung akibat program ini. Bagi yang benar-benar kreatif, usaha ekonomi mikro yang ditekuninya benar-benar mendatangkan hasil, sehingga pendapatan menjadi meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Instruksi Presiden Republik Indonesia,

- Nomor 12 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
- Arsana, I. M. 2004. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya), *Jurnal Ekobis*, Tahun ke 9 No. 2 Agustus 2004; hal 495 – 511.
- Djalil, Sofyan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Latar Belakang dan Kebijakan Mengenai BBM, 30 September 2005
- Gillis, Malcom, *Economics of Development*, New York: W.W. Norton Company, Third Edition, 1992
- Simamora, Bilson, (2001). *Remarketing for Business Recovery*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan (2001). Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi: Studi Empiris Pada Kebijakan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: Perpod.
- Tambunan T. 2001. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tarumingkeng R.C. (editor) 2001. Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Kajian Pemodelan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana IPB Bogor.
- www.kompensasibbm.com
- www.mediaindo.co.id